



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**  
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

**KABUPATEN LEBONG**

**RABU, 04 SEPTEMBER 2019**

**SUMBER BERITA**

<b>x</b>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERISAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Pajak Kendaraan Dinas Lebong Diawasi KPK**

**Menunggak  
Rp 500 Juta**

**PELABAI** - Ternyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tidak sanggup mengurus pajak seluruh kendaraan dinas. Dalam sosialisasi pajak daerah yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu kemarin (3/9), lebih 30 unit kendaraan dinas tidak dibayar pajaknya oleh Pemkab Lebong. Nilai tunggakan mencapai Rp 500 juta.

Padahal masalah pajak kendaraan dinas masuk pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam waktu dekat, KPK dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu akan menindaklanjuti persoalan tunggakan pajak kendaraan dinas. "Kami harap masalah pajak kendaraan dinas ini menjadi perhatian serius Pemkab Lebong," ujar Sekretaris BPKD Provinsi Bengkulu, Rusli Hasan, S.Sos.

Lebih lanjut disampaikan, diduga kendaraan dinas yang pajaknya menunggak itu sebagian besar tidak lagi digunakan. Termasuk

kendaraan dinas yang sudah dilelang, namun belum dihapuskan dari daftar aset. Dimintanya, Bidang Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong memperbarui data kendaraan dinas yang ada saat ini. "Untuk kendaraan dinas yang sudah dilelang segera dihapus dari daftar aset supaya tidak terus-terusan tercatat tunggakan pajaknya," terang Rusli.

Terpisah, Kapolres Lebong, AKBP. Andree Ghama Putra, SH, S.IK melalui Kasat Lantas, Iptu. Panehan Washington Simamora menegaskan, pihaknya juga menargetkan penertiban roda dua dan roda empat yang sudah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam Operasi Patuh Nala 2019. Diingatkannya, pemilik kendaraan yang masa berlaku STNK sudah habis segera mengurusnya ke kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

"Ini juga bertujuan membantu Pemkab Lebong meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah, red) dari sektor pajak kendaraan," tandas Panehan.(sca)